

2-28-2016

Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan

Daniel Susilo

University of dr. Soetomo Surabaya, dani.susilo.jc@gmail.com

Abdul Kodir

Semarang State University

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Women's Studies Commons](#)

Recommended Citation

Susilo, Daniel and Kodir, Abdul (2016) "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan," *Jurnal Politik*. Vol. 1: Iss. 2, Article 5.

DOI: 10.7454/jp.v1i2.1124

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan

DANIEL SUSILO *

Fakultas Ilmu Komunikasi – Universitas dr. Soetomo Surabaya
Jalan Semolowaru 84, Surabaya, 60118
Indonesia

ABDUL KODIR * *

Fakultas Ilmu Sosial – Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Lowokwaru, Malang, 65145
Indonesia
Email: dani.susilo.jc@gmail.com

ABSTRAK

Tubuh perempuan dan eksistensi menjadi bagian yang keduanya saling mengikat. Tubuh menjadi titik awal mengenai eksistensi perempuan itu sendiri. Tubuh perempuan sebagai komoditas dan instrumen politik dalam sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari anggapan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang berbahaya bila tidak dikendalikan. Beragam kebijakan kuasa dilakukan demi kontrol penuh atas tubuh perempuan. Perempuan sendiri sebagai empunya tubuh tidak berdaya melawan kontrol dan kuasa atas tubuhnya. Perlawanan tersebut akan dengan mudahnya dilabeli bukan perempuan baik-baik. Kendali negara atas tubuh tersebut justru dianggap bentuk kehadiran negara dengan dalih kemaslahatan umum. Dalam telaah lain, Foucault dan ekofeminisme hadir untuk merangkai pergolakan melawan kuasa atas tubuh perempuan tersebut. Terbentuknya kekuasaan atas seksualitas dilakukan melalui pendisiplinan tubuh dan politik populasi untuk meregulasi tingkat pertumbuhan penduduk. Foucault mengkritisi segenap upaya untuk mengendalikan tubuh perempuan. Beragam kebijakan yang lebih ekstrem dengan aksi nyata dalam melibatkan diri dengan lingkungan (bumi). Artikel ini bertujuan ini membuktikan tentang kekuasaan melalui aparaturnya mengendalikan tubuh perempuan melalui kebijakan reproduksi. Tulisan ini juga menggambarkan korelasi penguasaan tubuh perempuan dengan bumi, dalam kaitannya dengan pandangan ekofeminisme. Ekofeminisme juga mengambil jalan lebih ekstrem dengan terlibat langsung dalam upaya penyelamatan bumi, area yang menjadi sentuhan pertama tubuh perempuan. Kepedulian pada tubuh perempuan berarti peduli pula dengan kelangsungan masa depan manusia.

Kata kunci: politik tubuh, perempuan, bumi, kuasa, perlawanan

ABSTRACT

The women's body in relation with the concept of existence is mutually binding. Body becomes a starting point to look at the existence of women themselves. The women's as commodity and political instrument historically cannot be separated as the former is in many occasions seen as dangerous, especially if it is uncontrolled. Various policies have been produced by authorities as the expression of control over women's bodies.

* Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo Surabaya.

** Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Women themselves as the owners of the body are powerless against the control and power over her body. Any resistances to response or demand for more control will simply be labeled as immoral and inappropriate. In fact, state control over the body is actually considered as a result of the willingness of the state's presence under the pretext of the need for more controlled public good. In other study, Foucault and ecofeminism present stringing struggle of many groups against any form of power over the woman's body. The formation of power over sexuality is conducted through disciplining the body and through a population policy to regulate the rate of population growth. Foucault criticized the effort to control women's body. The aim of this article is to prove the power through its apparatus controls women's bodies through reproductive policies. This paper also describes the mastery correlation of the female body with earth, in relation with the views of ecofeminism. Ecofeminism also takes a more extreme way to be directly involved in saving earth, the first territory heavily linked with the women's body. The concern with women's bodies also means caring about the future survival of human.

Keywords: body politics, women, the earth, the power, resistance

PENDAHULUAN

Perempuan dalam berbagai sisi sering dikaitkan dengan suatu istilah yang melekat mengenai posisinya dalam media yaitu ketidakadilan (Hermes 2007, 193). Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat pertama-tama dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non manusia atau alam (Arivia 2006, 381). Upaya mendefinisikan perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, maka secara konseptual, simbolik, dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminisme dan ekologi. Sebagai contoh, dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia penyebutan tanah air (bumi) sering dilekatkan dengan ibu pertiwi (sifat feminitas). Dalam pandangan Karen J. Warren (dalam Arivia 2006, 381), hal ini tidak mengherankan mengingat masyarakat Indonesia dibentuk oleh suatu sistem nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku, yang berangkat dari suatu kerangka kerja patriarki, yang melakukan justifikasi terhadap hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Dalam catatannya, kerangka kerja tersebut berjalan sebagai berikut:

1. Cara berpikir dengan nilai-hierarkis, misalnya "atas-bawah", cara berpikir yang menempatkan nilai, prestise, status sebagai "yang atas" dan yang lainnya "yang bawah";
2. Nilai dualisme, misalnya, bersikap oposisional (buka saling melengkapi), eksklusif (bukan inklusif), status dan prestise menjadi

dasar dualisme ini, dualisme yang memberikan nilai tinggi pada “akal”, “rasio”, “laki-laki” dan bukan pada “tubuh”, “emosi” dan “perempuan”, dan

3. *Penekanan pada logika dan dominasi, misalnya struktur argumentasi yang membenarkan sub-ordinasi* (Arivia 2006, 381-383).

Warren (Arivia 2006, 381-383) juga mengungkapkan bahwa cara berpikir hierarkis, dualistik (biner), dan menindas adalah pola berpikir maskulin yang telah mengancam keselamatan perempuan dan alam. Faktanya, perempuan memang selalu di-“alamkan” atau di-“feminimkan”. Di-“alamkan” bisa diasosiasikan dengan binatang, seperti yang telah diutarakan dalam paragraf di atas seperti ayam, kucing, ular, dan sebagainya; dan di-“feminimkan” bila dikatakan diperkosa, dikuasai, dipenetrasi, digarap, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang dipakai dalam menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan alam. Sebagai contoh tanah yang digarap, bumi yang dikuasai, dan hutan yang diperkosa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mengada-ada bila perempuan dan alam mempunyai kesamaan secara simbolik karena sama-sama ditindas oleh mereka (*other*) yang berkuasa dengan menggunakan atribut maskulin.

Persoalan mengenai tubuh perempuan dan alam yang mengalami penindasan ini melahirkan kajian-kajian yang mendalam dalam perspektif ekofeminisme. Candraningrum (2014) memandang persoalan penindasan ini sebagai bagian dari politik penundukan karena pemilik kuasa berusaha melakukan kendali atas tubuh perempuan. Tidak hanya itu, Candraningrum juga menandakan bahwa kapitalisasi tubuh perempuan dan reduksi alam terjadi secara bersamaan, sebagai upaya peneguhan dominasi kuasa. Karena itu kajian yang memberikan kritik terhadap politik tubuh perempuan penting untuk dikaitkan dengan pandangan mengenai alam. Sayangnya, dalam pandangan penulis belum banyak tulisan yang melakukan langkah serupa sehingga kajian ini dirasakan perlu untuk dilakukan. Upaya-upaya pengaitan ini sudah dilakukan oleh Dewi Candraningrum mulai tahun 2000-an dengan peluncuran seri-seri kumpulan esai yang diberi judul Ekofeminisme. Hingga tulisan ini ditulis, terdapat tiga seri dari kumpulan esai terse-

but. Tulisan ini berusaha melengkapi kajian terbaru dalam aktualisasi persoalan tubuh perempuan dan alam, terutama mengenai kendali atas tubuh perempuan dan korelasinya dengan alam.

Beranjak dari alasan itu, tulisan ini memfokuskan tentang upaya politisasi tubuh perempuan, secara khusus kebijakan politisasi tubuh perempuan di Indonesia, dan korelasinya dengan perspektif ekofeminisme. Politisasi ini berkaitan pula dengan upaya perlawanan perempuan melalui pendekatan alam. Perlawanan dengan pendekatan alam ini, sudah bergema semenjak akhir tahun 2000an melalui sorotan–sorotan tajam dan diskursus dalam berbagai jurnal, seperti Jurnal Perempuan. Politisasi tubuh perempuan yang dimaksud oleh penulis ialah tentang pengendalian atas seksualitas perempuan. Penulis memandang politisasi tubuh perempuan menjadi signifikan, karena tubuh perempuan yang berdekatan dan bersentuhan langsung dengan alam.

Pendekatan dalam mengurai problematika yang menjadi fokus dalam tulisan ini ialah kritik feminis. Pendekatan ini dipilih penulis, karena dalam pendekatan kritik feminis memfokuskan pada “apa yang tidak ada” daripada “apa yang ada” (Guerin 1999, 196). Pendekatan ini menggunakan sudut pandangan berbeda dalam memahami persoalan perempuan dari sudut pandang yang cenderung maskulin. Pendekatan ini menjadi salah satu rumpun metode penelitian kritis (Neuman 2013, 123). Penggunaan metode penelitian kritis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menjelaskan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat fundamental terkait upaya politisasi tubuh perempuan. Comstock (1982, 378) berpendapat bahwa metode penelitian kritis dimulai dari adanya masalah-masalah sosial nyata yang dialami oleh individu, kelompok-kelompok, atau kelas-kelas yang tertindas dan teralienasi dari proses-proses sosial yang sedang tumbuh dan berkembang. Faktor ketertindasan yang dialami perempuan menjadi relevan dengan politik represi yang terjadi pada perempuan di Indonesia sehingga layak untuk diterapkan mengingat kemampuannya dalam mengangkat perspektif yang berasal dari mereka yang tertindas atau teralienasi. Pendekatan ini juga berorientasi kepada sebuah aksi yang nantinya bertujuan untuk menciptakan adanya perubahan sosial di masyarakat. Karena itu,

penulis juga berupaya untuk mengajukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi aksi nyata dari perlawanan terhadap politisasi perempuan itu dalam pandangan ekofeminisme.

NILAI DAN IMPLIKASI DALAM EKOFEMINISME

Mengapa ekofeminisme menjadi perbincangan yang dapat dihubungkan dengan politik tubuh? Hal itu dikarenakan ekofeminisme menawarkan beberapa penjelasan penting dari kehidupan sosial manusia dan permasalahan ekologi (Zimmerman 1994, 233). Dengan demikian, ekofeminisme sangat berpotensi untuk membawa wawasan aktivis perempuan kepada etika lingkungan. Beberapa hal terkait filosofi lingkungan, yang termasuk di dalamnya para penganut ekologi dalam (*deep ecology*) telah menunjukkan kehadiran mereka yang ternyata bersifat maskulin (Plumwood 1993, 2). Ekofeminisme juga secara tajam mampu memperkaya analisis feminis pada ranah dominasi sosial (Seager 1993, 56).

Foucault, sebagai filsuf pasca-strukturalis, menyatakan bahwa tubuh dikuasai oleh modernitas melalui kekuasaan bio-medis. Dia berargumen bahwa secara khusus tubuh perempuan diamati dan dikendalikan sedemikian rupa dengan ketat karena tubuh dalam pandangan modernitas merupakan sarana produksi (Jones 2009, 180). Tubuh perempuan dapat dikatakan menempati posisi utama dalam wacana modernitas. Lebih lanjut Foucault menyebutnya sebagai fetisisme tubuh karena penetrasi regulasi wacana yang berpusat pada tubuh, utamanya persoalan rahim. Akibatnya, perempuan menjadi polisi bagi tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan diawasi sedemikian rupa, semata-mata untuk memenuhi standar kriteria wacana yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini sering disebut sebagai panoptisisme (Sarup 2008, 102).

Aktivis perempuan banyak menulis tentang ‘lingkungan dan pembangunan’ yang sering menggambarkan bahwa perempuan merupakan korban dari degradasi lingkungan dan menekankan konsekuensi buruk dari degradasi pada perempuan. Posisi dari ekofeminis sendiri telah disebut dalam ‘*Post-Victimology Stance*’ (Shiva 1989) yang memercayai bahwa perempuan mampu memobilisasi pertahanan untuk lingkungan. Ekofeminis memercayai bahwa perempuan memiliki ke-

dekatan dengan alam untuk memimpin mereka untuk bertahan dan berlandung.

Sikap dari ekofeminis itu telah memimpin sebuah generasi dalam jumlah yang cukup besar dalam literatur yang berbasis kebijakan internasional guna menekankan hubungan positif antara perempuan dan lingkungan. Ini kemudian diasumsikan bahwa apa yang kemudian baik untuk lingkungan adalah baik untuk perempuan dan intervensi dari advokasi akan mendukung lingkungan untuk keuntungan perempuan. Karena itu, Jackson (1994, 1952) mengusulkan semacam alternatif analisis dari perspektif ekofeminis yang menganalisis bagaimana sifat sosial dibangun dari hubungan gender. Selain itu, analisis ini memahami peran gender secara sosial dan melalui bangunan sejarah.

TUBUH PEREMPUAN: KEBIJAKAN DAN PENGUASAAN

Tubuh menjadi representasi tentang keberadaan manusia. Melalui tubuh, kita dapat mengetahui perbedaan ras dan suku bangsa yang ada di belahan dunia dengan memperhatikan bentuk manusia secara fisik. Bentuk tubuh setiap manusia dipengaruhi oleh iklim demografis tempat mereka tinggal, dari tinggi badan, warna kulit, bola mata, dan rambut atau bahkan bentuk hidung sekalipun. Tubuh memiliki sejarah yang sangat cukup panjang. Pengiblat Darwin mendasarkan pada hukum evolusi sosial bahwa tubuh manusia sebelum sampai saat ini merupakan proses evolusi dari kera. Terjadinya proses evolusi tubuh manusia ialah melalui proses perubahan untuk penyesuaian. Hal itu berlaku pula pada tubuh perempuan sebagai bagian dari visual yang dikuasai oleh pemangku kebijakan sebagai bentuk pengendalian atas dominasi. Dengan demikian tubuh tidak hanya memiliki fungsi organik semata, akan tetapi tubuh juga memiliki sebuah nilai dan menjadi identitas sosial tersendiri bagi pemilik tubuh terutama tubuh perempuan.

Tubuh perempuan dan eksistensi menjadi bagian yang saling mengikat ketika tubuh menjadi titik awal mengenai eksistensi perempuan itu sendiri. Saptandari (2013) menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi menarik terhadap kajian tubuh dan perempuan, yakni pertama bahwa tubuh termasuk ke dalam ranah seksualitas dan perempuan, akan

tetapi kemudian mengalami paradoks dan ironi. Saat ini perempuan masih belum sepenuhnya menerima hak yang seharusnya ia dapatkan, sehingga terdapat pihak lain baik dalam bentuk individu, kelompok, norma, bahkan aturan mengikat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan makna, mengikat dalam aturan, dan bahkan melakukan kontrol penuh atas tubuh perempuan. Kedua, saat ini konstruksi ataupun pemaknaan perempuan baik dalam ranah publik ataupun privat menjadikan perempuan pada posisi subordinat sehingga menyebabkan kerentanan sosial baik secara fisik, reproduksi (kesehatan), dan bahkan keberadaan atau eksistensi perempuan itu sendiri.

Dalam wacana masyarakat umum, posisi perempuan dikonstruksikan sebagai bentuk pasangan yang berlawanan (oposisi biner) dengan laki-laki. Laki-laki dikonstruksikan dengan atas (*up*), kanan (*right*), tinggi (*high*), kebudayaan (*culture*), kekuatan (*power*), dan kekuatan (*strength*). Sedangkan perempuan dikonstruksikan sebaliknya, yakni bawah (*down*), alam (*nature*), dan kelemahan (*weakness*) (Moore dalam Saptandari 2013, 65). Konstruksi tersebut membentuk wacana perempuan yang berada posisi subordinat yang kemudian berpengaruh signifikan pada kehidupan sosial. Kebijakan Keluarga Berencana (KB) yang menjadi “alat” negara menguasai tubuh (organ reproduksi) perempuan menjadi satu yang populer dalam menjelaskan bagaimana kuasa dan negara berkolaborasi melakukan “kejahatan” atas tubuh perempuan. Kebijakan Keluarga Berencana itu mengkonstruksi bagaimana tubuh perempuan dipahami sebagai sesuatu yang berbahaya bila tidak dikendalikan. Pola berpikir patriarki yang didengungkan, utamanya, pada saat Orde Baru menguasai Indonesia berpusat pada bagaimana kendali diberlakukan pada perempuan. Dengan cara pandang demikian maka segala bentuk alat pengendali kehamilan seperti KB susuk, suntik, IUD, dan pil KB seakan telah memberangus tubuh perempuan, mengingat rahim dianalogikan sebagai sebuah tanah subur yang harus dihentikan kesuburannya karena membahayakan negara. Bayart (dalam Candraningrum 2014) mengenalkan eksistensi perempuan dan tubuh melalui politik rahim. Sementara itu, Candraningrum (2014) berpendapat bahwa “rahim sebagai metafora dari perut, yang menguasai pangkal dari segala

hajat reproduksi sebuah bangsa. Penguasaan politis atas rahim merupakan kunci kepada kekuasaan. Kapasitas kekuasaan dilekatkan pada tubuh perempuan dan lanskap penguasaannya adalah kontrol negara atas organ-organ reproduktif dan seksual perempuan”.

Kondisi demikian menjadikan perempuan tercerabut atas kepemilikan tubuhnya. Di lain pihak, kontrol negara menguat pada saat Orde Baru dengan membuat aturan hukum tentang pemaksaan melalui penggunaan alat kontrasepsi. Orde Baru dengan kuasanya melakukan pemaksaan aturan yang bertujuan untuk membatasi jumlah anak pada setiap keluarga. Kampanye yang dilakukan kemudian dimodifikasi dengan slogan ‘dua anak cukup’. Dengan adanya kebijakan tersebut, perempuan yang sudah terkonstruksi memiliki tubuh yang “jahat” akan terus teralienasi dari kehidupan yang memiliki kuasa. Perempuan bahkan tidak berhak untuk menentukan kapan organ reproduksinya digunakan, atau apakah organ reproduksinya boleh dicerabut hak biologisnya (bersalin). Sedangkan mereka yang menyuarakan perlawanan atas penguasaan tubuh mereka dianggap bukan perempuan baik-baik dan dianggap tidak normal (Sarah 2006, 7-8).

PERLAWANAN ATAS KUASA TUBUH (1): TELAAH FOUCAULT ATAS TUBUH

Foucault, dalam bukunya *Sejarah Seksualitas* (2000, 44), menganalisis bahwa seksualitas menjadi pusat dominasi kekuasaan. Foucault menunjukkan adanya hubungan seksualitas yang dianggap menyimpang seperti homoseksualitas, biseksualitas, masokisme, dan sodomi, yang lahir atas terbentuknya relasi kekuasaan dengan pengetahuan melalui pengakuan dosa dalam kekristenan. Dalam relasi tersebut pendengar pengakuan dosa tersebut ialah orang dari kalangan ilmuwan seperti psikiater, sehingga dalam posisi ini psikiater dianggap sebagai profesi yang menentukan perilaku seks mana yang dianggap normal dan abnormal.

Selain itu, Foucault sendiri melacak jejak sejarah secara mendalam mengenai wacana sejarah seks di era kaum Victoria dan gereja. Ia ingin mengubah persepsi umum masyarakat bahwa apa yang mereka telah yakini atas kehidupan seks yang saat itu direpresi dan dianggap tabu

serta tidak boleh diperbincangkan di khalayak umum itu salah. Dari penelusuran sejarah dengan metode arkeologi Foucault menemukan temuan yang sangat berbanding terbalik, karena jika seks sengaja untuk ditekan dan menjadi larangan maka yang terjadi seks sendiri akan menjadi sesuatu yang kuat dan menyebar ke dalam masyarakat dalam bentuk wacana itu sendiri.

Terbentuknya kekuasaan atas seksualitas melalui pendisiplinan tubuh dan melalui politik populasi bertujuan untuk mengendalikan tingkat laju populasi. Pembicaraan yang terbuka tentang seksualitas ialah untuk mengatur dan mencatat jumlah kelahiran. Mengaitkan antara seksualitas dengan politik ini, Foucault kemudian memperkenalkan dengan istilah *biopolitics* dan *biopower*. *Biopolitics* yang dimaksudkan oleh Foucault ialah ketika biologi dipikirkan dalam ranah politik, sehingga situasi demikian memberikan sebuah norma yang menggantikan hukum yang bersifat mengikat. Sedangkan *biopower* ialah bentuk kekuasaan yang telah dinormalisasi. Jika *biopolitics* berusaha mengontrol dan mengatur penduduk melalui konsep kesehatan seperti KB, kontrol kesehatan, dan angka harapan hidup, maka bentuk mekanisme *biopower* bekerja pada teknik untuk menormalisasi untuk menggantikan hukuman (Haryatmoko 2002, 19).

Masalah penduduk adalah masalah sosial dan masalah ini berhubungan dengan seksualitas. Oleh karena itu, kekuasaan berusaha mempelajari dan mengintervensi perbincangan seksualitas menjadi masalah publik. Kekuasaan tidak hanya tampak dalam ranah struktur dan melalui tindakan represif, akan tetapi kekuasaan juga masuk hingga ke ranah kehidupan privat (Afandi 2011, 132). Selain itu, Haryatmoko (2002, 21) menambahkan bahwa “kontrol masyarakat terhadap individu tidak hanya pada tingkat kesadaran dan ideologi, tetapi juga dalam tubuh dan dengan tubuh. Ini berarti tubuh adalah realitas politik, dan kedokteran adalah bentuk strategi politik”.

Foucault dalam *Disciplines and Punishment* (Suyono 2000, 196-197) menjelaskan mengenai konsep ‘tubuh yang patuh’. Hal ini kemudian sangat relevan jika dikaitkan dengan seksualitas. Sebagai tubuh yang patuh, perempuan diformulasikan secara ketat melalui wacana keku-

asaan dalam kebijakan kesehatan dan kebijakan kesehatan reproduksi (Saptandari 2013, 67). Di masa Orde Baru misalnya, konteks strategi pengendalian dan pengawasan tubuh atau seksualitas perempuan ialah melalui aparatus administrasi dan pendisiplinan medis-ekonomis-demografis, dalam hal ini BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) (Adian 2002, 48).

PERLAWANAN ATAS KUASA TUBUH (2): EKO-FEMINISME YANG MENGHENTAK

Astuti (2012, 51) mengungkapkan bahwa ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan feminis, perdamaian, dan ekologi yang mengemuka pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Astuti menjelaskan *term* ini menjadi populer dalam kaitannya berbagai proses dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup, yang semula dipicu oleh bencana ekologis yang terjadi secara berulang-ulang.

Ekofeminisme bertolak dari sebuah penentangan ketidakadilan terhadap perempuan dan lingkungan. Bumi bagi para ekofeminis adalah gambaran yang dapat dipadankan dengan perempuan (lihat Arivia 2006, 381), mengingat perempuan senantiasa diasosiasikan dengan alam. Baik perempuan maupun alam sama-sama mengalami represi sedemikian rupa oleh kuasa-kuasa maskulin.

Ekofeminisme yang lahir dari rahim tradisi kritik menghadirkan perspektif yang menegaskan bahwa bumi sebagai sosok ibu (*femininity*) yang harus diselamatkan dari ancaman kerusakan yang dilakukan korporasi yang didukung lembaga keuangan internasional dan pemerintah. Perempuan adalah tangan pertama (*first hand*) yang bersentuhan dengan sumber daya alam karena itulah perempuan itu sendiri yang kemudian menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap risiko dan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Langkah kritis yang dihadirkan ekofeminisme berujung pada aksi kesadaran bahwa tubuh perempuan dan bumi yang sama-sama rentan dengan kerusakan oleh kebijakan politik tubuh. Perempuan tidak hanya berdiam melihat kerusakan akan tubuhnya sendiri akibat kuasa “me-

reka” (*the other*) yang memiliki dominasi maskulinitas. Ekofeminisme bergerak jauh dengan konsep berdamai dengan sesama penghuni bumi untuk menyelamatkan perempuan dan bumi dari kerusakan. Kebutuhan penting untuk berbagi dalam masa kini ditekankan oleh ekofeminisme sebagai kemutlakan. Astuti (2012, 51) menjelaskan bahwa dalam berbagi kita perlu mengendalikan diri untuk memberikan kesempatan bagi yang lain. Ekofeminisme juga sangat menekankan perlunya mengakhiri permainan kekuatan dan mulai berbagi serta membangun solidaritas antar penghuni.

Dengan demikian, tubuh perempuan yang telah dirusak oleh kekuasaan, memerlukan aksi penyelamatan nyata yang berbasiskan kepedulian. Sikap ini serupa dengan sikap terhadap bumi yang juga memerlukan kepedulian untuk lepas dari cengkeraman jahat kekuasaan dan terhindar dari bencana ekologi. Dengan perempuan memahami bahwa tubuhnya adalah hak miliknya (*empunya*), mereka akan bersama-sama dengan penghuni lain di bumi untuk menjaga tubuhnya bukan sebagai *property* yang diatur dengan obyek kuasa, melainkan sebagai sumber kehidupan bagi generasi selanjutnya yang akan terus dijaga, sama seperti bumi.

Dengan didasarkan pada cara pandang ekofeminisme tersebut tulisan ini mengajukan beberapa aksi yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap politisasi tubuh perempuan, paling tidak oleh perempuan sendiri. Aksi nyata langsung yang dapat perempuan lakukan untuk menyelamatkan tubuhnya dapat dilakukan di tiga wilayah, yaitu individu, keluarga, dan sosial. Dalam wilayah individu, perempuan juga dapat membangun kepedulian terhadap tubuhnya sendiri dengan mengurangi pemakaian aksesoris berbahan dasar satwa. Tidak sedikit sepatu, tas, dan ikat pinggang berharga mahal diproduksi dengan bahan dasar tubuh satwa, sehingga perburuan dan pembantaian satwa tidak henti-hentinya dilakukan dengan dalih bisnis.

Sementara itu, dalam wilayah keluarga perilaku hemat dalam penggunaan deterjen dapat menjadi salah satu langkah kecil yang memiliki makna penyelamatan tubuhnya. Dengan mengurangi penggunaan deterjen itu berarti pihak perempuan sendiri telah berupaya mengurangi kerusakan lingkungan yang langsung dapat berdampak pada kesuburan

tanah dan kualitas air. Saat tanah menjadi tidak subur, tubuh perempuan menjadi rentan dan mengalami penurunan kualitas karena harus mendapatkan bahan pangan dengan susah payah. Dalam ranah sosial, aksi perlawanan tersebut dilakukan dengan terus menumbuhkan kesadaran pada perempuan akan tubuh dan korelasinya dengan alam, yang merupakan wilayah privatnya.

Pada dasarnya, itulah esensi dari ekofeminisme yang memiliki kaitan erat antara alam dan tubuh perempuan. Kesadaran terhadap alam dapat juga menghentak menghentak ranah seksualitas perempuan bahwa upaya penyadaran bagi perempuan berarti juga kesadaran bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, bukan milik laki-laki ataupun negara (*the others*). Perempuan sendirilah yang berhak menentukan dipakaikan apa tubuh ini, ataupun kapankah rahimnya digunakan, bahkan hingga kapan rahimnya akan digunakan. Upaya-upaya ini dalam pandangan ekofeminisme menjadi bagian dari aksi-aksi penyadaran dalam mengingatkan relasi perempuan dengan alam.

KESIMPULAN

Tubuh menjadi entitas tunggal pada setiap eksistensi manusia, yang berarti sosok tubuh tidak hanya dimaknai sebagai wujud fisik pada setiap manusia. Hal ini berarti bahwa tubuh tidak hanya dikenali melalui bentuk tubuh yang dapat kita kenali melalui warna kulit, bentuk badan, dan lain sebagainya. Tubuh menjadi subyek yang mewakili rasio, pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran.

Tubuh kini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk subyek, melainkan menjadi obyek bagi rezim pengetahuan ataupun kekuasaan sekalipun. Obyek sendiri dimaknai bahwa tubuh perempuan menjadi ranah yang sangat eksploitatif. Dari perspektif wacana kekuasaan Foucault misalnya, tubuh perempuan menjadi obyek para rezim penguasa untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian tersebut tidak dilakukan dengan represifitas negara akan tetapi melalui kontrol atau pengendalian dan normalisasi.

Sedangkan perspektif ekofeminisme menilai bahwa bumi dianggap sebagai tubuh perempuan yang keduanya juga mengalami kerentanan.

Kerentanan tersebut diperbaiki dengan aksi nyata perlindungan bumi dan perempuan dari cengkeraman kuasa–kuasa yang ingin mengendalikannya. Kerusakan pada bumi juga berakibat pada rusaknya tubuh perempuan karena perempuanlah tangan pertama yang bersentuhan dengan bumi. Kepedulian tersebut dapat dimulai dengan aksi sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari–hari. Kepedulian kepada alam berimbas secara langsung pula dengan kepedulian terhadap tubuh perempuan. Kepedulian pada tubuh perempuan berarti peduli pula dengan kelangsungan masa depan manusia. Aksi–aksi perlawanan yang dilakukan penggiat ekofeminisme yang berkuat pada tataran kesadaran perempuan tentang kaitannya dengan alam, menjadi langkah yang harus diakselerasi dan ditelaah lebih lanjut. Ke depan, perlu adanya studi lebih mendalam terhadap keefektifan upaya aksi ekofeminisme di Indonesia dalam upaya penyelamatan bumi. Karena, selama bumi masih berputar dan perempuan masih eksis, maka sejauh itulah mereka akan saling mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2002. “Menabur Kuasa Menuai Wacana.” *BASIS* (No. 01-02): 42 – 49.
- Afandy, Abdullah Kohizin. 2012. “Konsep Kekuasaan Michael Foucault.” *Teosofi 2* (No. 1): 131 – 149.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Astuti, T.M. Pudji. 2012. “Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan”. *Indonesian Journal of Conservation 1* (No. 1): 49-60.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Candraningrum. Dewi, 2014. “Politik Rahim Perempuan Kendeng Menolak Tambang Semen” <http://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-politik-rahim-perempuan-kendeng-menolak-tambang-semen>. (2 November 2015).
- Comstock, Donald E. 1982. “A Method for Critical Research”, dalam *Knowledge and Values in Social and Educational Research*, ed. Eric

- Bredo dan Walter Feiberg. Philadelphia: Temple University Press, 370-390.
- Foucault, Michel. 2000. *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*, terj. Rahayu S. Hidayat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Guerin, Wilfred L. 1999. *A Handbook of Critical Approaches to Literature*. New York: Oxford University Press.
- Haryatmoko. 2002. "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan." *BASIS* (No. 01-02): 8 – 21.
- Hermes, Joke. 2007. "Media Representations of Social Culture: Gender" dalam *Media Studies: Key Issues and Debates*, ed. Eoin Deveroux. London: SAGE Publications : 191-210.
- Jackson, C. 1993. "Doing What Comes Naturally? Women and Environment in Development". *World Development* 21 (No. 12): 1947-1963.
- Neuman, Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Plumwood, Val. 1996. *Feminism and the Mastery over Nature*. London: Routledge.
- Saptandari, Pinky. 2013. "Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi." *Biokultural* 2 (No.1): 53-71.
- Santi, Sarah. 2006. "Khitan Perempuan: Legitimasi Agama dan Budaya Atas Kekerasan dan Pengendalian Tubuh Perempuan." *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa* 3 (No.1): 1-9.
- Seager, Joni. 1993. *Earth Follies: Feminism, Politics and the Environment*, London: Earthscan Publication.
- Suyono, Seno Joko. 2000. *Tubuh Yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiva, Vandana. 1989. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*, London: Zed Book.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Zimmerman, Michael E. 1994. *Contesting Earth's Future: Radical Ecology and Postmodernity*. Barkeley: University of California Press.